

Populisme Islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia?

Andi Eka Putra

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
andiekaputra@radenintan.ac.id

Diterima: 29 Mei 2019 Disetujui: 6 Januari 2020 Dipublikasikan: 3 Maret 2020

Abstrak

Kebangkitan Islam di Indonesia tidak hanya ditandai dengan peningkatan jumlah pemeluk Islam di Indonesia, melainkan diperlihatkan dengan suatu ekspresi politik yang menonjol, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di lapangan Monas Jakarta di mana ratusan ribu umat Islam menyatakan aksi Bela Islam. Gejala ini oleh para sarjana politik disebut sebagai gerakan populisme Islam Indonesia. Gerakan ini kian menguat seiring dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April 2019 lalu di mana kedua calon sama-sama memperebutkan massa Islam. Populisme Islam sebetulnya sama dengan gerakan populis pada umumnya, di dalamnya ada berbagai kepentingan kelas yang bisa jadi antagonistik dan berbeda tingkat artikulasinya. Ciri khas dari populisme Islam Indonesia adalah, bahasa politiknya dari agama Islam. Populisme Islam merupakan sebuah kritik yang wajar di sebuah negara demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia. Ia merupakan counter yang sehat dan bahkan bagian yang sah dan legal dalam negara yang menganut prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menganggap populisme Islam Indonesia sebagai makar dan ancaman, adalah anggapan berlebihan dan kurang ditopang oleh kenyataan sejarah dan realitas politik hari ini.

Kata kunci: populisme Islam, tantangan atau ancaman bagi Indonesia

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April 2019 baru saja berlalu dan menyisakan suatu bahan yang menarik untuk direfleksikan dan direnungkan dalam konteks politik Islam di Indonesia. Siapa calon presiden terpilih hasil pemilu 17 April lalu belum diumumkan oleh KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Sambil menunggu hasil siapa pemenang dan yang akan menjabat sebagai presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, ada baiknya kita melakukan kajian kritis terkait pelajaran terpenting dari proses politik dalam pemilu yang baru saja berlalu itu.

Tulisan ini hendak merefleksikan secara lebih kritis tentang proses pemilihan presiden tersebut dalam konteks menguatnya sentimen politik Islam akhir-akhir ini, termasuk di Indonesia. Politik identitas Islam seringkali dikaitkan dengan gerakan mancanegara dan afiliasi politik transnasional, walau terkadang anggapan itu tak selalu benar. Kemunculan gerakan-gerakan politik umat Islam di

Indonesia akhir-akhir ini dianggap sebagai bagian dari suatu gerakan populis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejumlah pengamat politik mengkhawatirkan adanya kebangkitan populisme Islam Indonesia¹ yang selama ini bagaikan bom waktu. Populisme Islam bahkan dianggap makar atau subversif yang harus diwaspadai dan dikontrol oleh negara karena ditakutkan menjadi ancaman terhadap negara atau terhadap kekuasaan.

Satu hal yang menonjol, di samping hal-hal lain, dari proses politik pemilihan presiden yang lalu adalah: kedua kandidat, baik pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, sama-sama menggunakan sentimen massa Islam dengan caranya masing-masing.

Kedua calon presiden secara nyata berebut konstituen Islam atau suara dari umat Islam baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika pasangan Prabowo-Sandi memperebutkan konstituen Islam dari kalangan menengah terdidik melalui organisasi seperti Muhammadiyah dan kader-kader PKS dan PAN, serta simpatisan massa aksi Bela Islam di Monas beberapa tahun lalu, maka pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperebutkan massa Islam akar rumput di bawah organisasi Nahdhatul Ulama (NU).

Kenyataan di lapangan memang tak se-simplistik pernyataan tersebut di atas. Namun menghubungkan Prabowo-Sandi dengan massa aksi Bela Islam 212 di Monas Jakarta beberapa waktu lalu, bukan hal berlebihan, karena sebagian besar pengamat memang melihat hal yang sama. Demikian pula menghubungkan massa nahdhyin atau NU dengan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jelas bukan hal mengada-ada karena selama ini Joko Widodo memang dikenal dekat dengan orang-orang NU ditambah keberadaan Ma'ruf Amin yang dipilih Joko Widodo sebagai wakil presiden.

Kenyataan demikian mempertegas bahwa massa Islam benar-benar menjadi perhatian serius kedua calon presiden dalam pemilu lalu, dan menjadi isu paling menonjol dalam massa kampanye keduanya sejak awal 2019. Massa Islam atau umat Islam menjadi isu sosial-politik yang hangat diperbincangkan, dan hal ini menjadi perhatian serius di panggung politik tanah air dan tak jarang menjadi lahan riset para sarjana mancanegara.

Di berbagai media massa Islam disebut-sebut sebagai suatu kekuatan besar untuk memenangkan pertarungan politik kedua belah pihak karena Indonesia memang negara mayoritas pemeluk Islam. Dikotomi Islam kota versus Islam desa menguat kembali. Para kontestan politik dan calon presiden berebut dengan massa Islam karena dianggap memiliki kekuatan yang riil yang tiada bandingannya dengan umat lain.

¹Apa itu populisme Islam Indonesia adalah masalah tersendiri. Hampir semua penulis tentang populis atau populisme Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata ini. Namun yang jelas, akar kata dari populisme atau populis, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai rakyat. Jadi, gerakan populisme Islam adalah suatu gerakan massa rakyat yang menggunakan bahasa politik yang berasal dari Islam. Sebuah misalnya Aksi Bela Islam 212 di Monas DKI Jakarta yang lalu, dapat disebut sebagai populisme Islam Indonesia.

Bahkan, dari beberapa hasil pengamatan di media massa, kebangkitan tersebut oleh beberapa pengamat politik dianggap sebagai suatu kebangkitan populisme Islam Indonesia. Populisme Islam Indonesia secara mencolok telah tampil lewat aksi massa Bela Islam di Monas dengan diikuti oleh beberapa sentimen lanjutan, seperti sentimen anti-Cina, anti-Kristen, anti-Asing, anti-Kafir, dan sebagainya, kemudian menguat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden April 2019 lalu.²

Kebangkitan populisme di Indonesia turut ditandai dengan adanya kebangkitan radikalisme Islam, yang mendorong sentimen lama mengenai anti-China, antek-asing, dan nasionalisme ekonomi. Para Islamis radikal menuntut untuk ditetapkannya hukum Syariah, dan telah masuk ke dalam organisasi-organisasi Muslim, partai-partai politik, serta universitas. Walau radikalisme Islam ini telah cukup berpengaruh, namun dalam politik nasional—misalnya di partai politik—gerakan Islam populis-radikal belum mampu mendapatkan ruang yang signifikan di parlemen.

Adalah menarik menganalisis secara lebih kritis fenomena populisme Islam Indonesia tersebut dari perspektif politik Islam sendiri.³ Sebab ini bukan hanya gejala dan trend politik khas Indonesia, tetapi juga kini menjadi fenomena di beberapa negara yang juga mayoritas memeluk Islam seperti di negara-negara Arab.

Dalam buku terbarunya, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*,¹ Vedi R. Hadiz mencoba melihat sebuah trend politik global dari populisme yang kini menjadi tantangan di sejumlah negara mayoritas Islam. Melalui buku ini, Hadiz menawarkan suatu pemikiran yang ia sebut sebagai pendekatan baru dalam mempelajari perpolitikan Islam.

Hadiz berusaha mendeskripsikan secara kritis kecenderungan-kecenderungan jangka panjang gerakan Islam dari kacamata sosiologi historis dan politik ekonomi, dengan pendekatan komparatif di beberapa negeri berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Mesir dan Turki. Inilah yang membuat buku Hadiz cukup representatif bicara soal populisme Islam di Indonesia.

Buku *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh LP3ES dengan judul *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (2019). Buku ini menurut

² Bahasan mengenai populisme Islam di Indonesia menjadi sebuah pembicaraan hangat dalam mimbar-mimbar akademik pasca-Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid. Aksi ini menyerukan pemerataan Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta atas dugaan kasus penistaan agama. Diikuti dengan pembentukan Alumni 212, muncul berbagai kelompok Islam yang muncul membawa narasinya masing-masing tentang *ummah*. Untuk bahasan lebih lengkap mengenai populisme Islam, lihat Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (LP3ES, Jakarta, 2019). Buku ini merupakan terjemahan dari buku aslinya berjudul *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*.

³ Persoalan populisme ini sangat menarik dari aspek sosio-politik, apalagi jika dihubungkan dengan pemilihan presiden yang baru saja berlalu. Sebab populisme menurut Roy Abimanyu merupakan “sumber daya material sekaligus sebagai resultat dari konflik yang terjadi dalam berbagai konteks sosial dan historis”. Dikutip dari <https://geopolitik.org/2017/02/09/ulasan-buku-islamic-populism-in-indonesia-and-the-middle-east/>. dibuka pada 27 April 2019 pukul 20. 00 WIB

Roy Abimanyu dalam tinjauannya berjudul “Ulasan Buku Vedi R. Hadiz: *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*”,⁴ merupakan riset Hadiz beberapa tahun sebelumnya, sehingga cukup *update* dari sisi pendekatan komparasi dengan dua negara lainnya, yaitu Mesir dan Turki. Selain itu, buku ini terbit di saat yang “tepat”, dalam konteks Indonesia, terkait dengan gelombang gerakan kaum Muslimin yang bereaksi terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok atau Basuki T. Purnama.⁵

Bahkan hemat penulis, buku ini sangat relevan dan kontekstual untuk menganalisis pemilihan presiden 17 April lalu karena kedua pasangan calon sama-sama menggunakan narasi Islam atau berebut massa Islam.⁶ Apa yang dipertunjukkan dalam pemilihan presiden lalu adalah suatu narasi populisme Islam sedang tumbuh dan mekar di Indonesia yang bisa jadi merupakan suatu tantangan politik masa kini, atau malah menjadi ancaman bagi demokrasi dan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Untuk memahami lebih jauh mengenai gerakan populisme Islam Indonesia perlu dideskripsikan secara lebih substansial makna dan kesejarahan munculnya gerakan ini di tanah air.

POPULISME ISLAM: MAKNA DAN SEJARAH

Banyak pakar telah merumuskan pengertian populisme baik secara sempit maupun luas, dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda maupun sama, serta dalam disiplin keilmuan yang sama maupun berbeda. Setiap definisi memiliki kekhasan masing-masing. Di sini saya bersepakat dengan definisi Vedi R. Hadiz dalam buku terbarunya tentang populisme Islam. Menurutnya, populisme masih sangat diperdebatkan dalam pergolakan ilmu sosial dan politik.⁷ Menurut Hadiz,

⁴ <https://geopolitik.org/2017/02/09/ulasan-buku-islamic-populism-in-indonesia-and-the-middle-east/>

⁵ Menurut Azyumardi Azra, dalam beberapa tahun terakhir ini istilah “populisme Islam” mulai menjadi wacana akademis di kalangan para ahli. Istilah itu digunakan untuk melihat fenomena politik Islam sejak terjadinya sejumlah aksi massa kalangan Muslim Indonesia pada akhir 2016 dan awal 2017 terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Azyumardi Azra, “Populisme Islam” dalam rubrik Resonansi harian *Republika* 28 Desember 2017

⁶ Narasi *ummah*, atau ke-umat-an, yang menjadi bagian sentral dari politik identitas di Indonesia akhir-akhir ini mengandung narasi bahwa *ummah* itu adalah bagian dari kelompok sosial yang sudah sejak dulu terpinggirkan secara sistematis. Dari zaman kolonial, pascakolonial, masa Orde Baru hingga demokrasi, Islam terpinggirkan. Narasi ini (baca: populisme Islam ini), memberikan potensi massa yang sangat besar untuk elite-elite yang saling berkompetisi saat ini. Massa orang yang marah, kecewa dan mungkin juga tingkat kepercayaan terhadap lembaga tidak terlalu tinggi, sehingga bisa berhimpun menjadi suatu massa besar. Maka tak heran jika baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sama-sama menggunakan populisme Islam saat pemilihan kemarin.

⁷ Hal ini diakui juga oleh Saiful Mujani. Menurut pengamatan Saiful Mujani, hampir semua penulis tentang populisme mengalami kesulitan dalam mendefinisikan kata ini. Para sarjana politik menurut Saiful Mujani gagal mencari konsensus apa yang dimaksud populisme, tapi mereka sampai pada kesepakatan bahwa populisme adalah sebuah konsep yang dipertarungkan (*contested concept*). Bahkan karya Ionescu dan Gellner (1969), yang disebut Taggart (2000) sebagai “*the definite collection on populism*”, pun dianggap gagal memaknai apa

dalam suatu wawancara dengan jurnal *Balairung* Universitas Gajah Mada, ia memiliki definisi sendiri tentang populisme yang sebenarnya tidak banyak penganutnya.

Menurutnya, populisme adalah suatu bentuk aliansi antar kelas yang sifatnya tidak seimbang. Ada elemen-elemen yang sifatnya dominan dan ada yang subordinat. Lalu, keduanya disatukan oleh satu narasi tentang suatu persamaan nasib. Dikarenakan sifatnya yang lintas kelas, aliansi-aliansi populis sifatnya penuh kontradiksi internal dan rentan. Oleh karena itu, untuk bisa dipelihara dan dijaga kelangsungannya selalu membutuhkan konflik dan kontroversi.

Hadiz menyadari bahwa populisme sebagai sebuah fenomena politik, cukup sulit didefinisikan. Menurutnya, populisme merupakan sebuah studi yang dipopulerkan oleh Ionescu dan Gellner, dan kemudian Canovan. Meski banyak mengamini Laclau yang lebih menekankan rantai ekuivalensi tuntutan-tuntutan yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat sebagai pembentuk gerakan populis, Hadiz lebih menegaskan kemunculan gerakan populis sebagai produk perjuangan/pertarungan kontemporer atas kekuasaan dan sumber daya material sekaligus sebagai resultat dari konflik yang terjadi dalam berbagai konteks sosial dan historis.

Argumen tersebut mengantarkan Hadiz kepada satu kesimpulan yang kemudian menjadi pisau analisis dalam buku *Populisme Islam*, yaitu populisme sebagai sebuah gerakan lintas kelas sosial yang asimetris. Menurutnya, dalam gerakan populis ada berbagai kepentingan kelas yang bisa jadi antagonistik dan berbeda tingkat artikulasinya.

Secara lebih khusus, Hadiz mengamati ciri khas dari populisme Islam dimana bahasa politiknya dari agama Islam. Perbedaan mendasar antara populisme secara konvensional dan populisme Islam adalah konsep dasar yang “*The Peoples*” sebagai rakyat yang ditindas oleh elite. Sementara, dalam populisme Islam konsep “*The Peoples*” diganti menjadi *ummah* yang ditindas dan terpinggirkan.

Hadiz menguraikan aspek kesejarahan munculnya gerakan populisme Islam, yang ia sebut sebagai warisan dari kebangkitan gerakan Pan-Islamisme yang muncul pada awal Abad 20 seiring dengan memudarnya Kekaisaran Utsmaniyah. Tema sentral dari gerakan tersebut adalah pembangunan *ummah* demi munculnya masa kejayaan Islam. Hadiz menggarisbawahi bahwa kemunculan gerakan tersebut sebagai reaksi terhadap dua hal. Pertama, “Dominasi Barat” yang pada saat itu direpresentasikan oleh masifnya kekuasaan kolonial negeri-negeri Eropa yang menjajah Afrika dan Asia. Kedua, “Pengaruh Barat” dalam bentuk gaya hidup, sistem nilai bahkan ideologi dan sistem politik/ekonomi seperti kapitalisme, sekularisme, pluralisme dan demokrasi.

Dalam pandangan Hadiz, kristalisasi gerakan politik Islam terjadi pasca Perang Dunia II di mana ide-ide Pan-Islamisme bergerak ke latar belakang sementara panggung dikuasai oleh ide-ide nasionalisme dan sosialisme. Dominasi kedua ide tersebut terlihat di negeri-negeri Arab, Afrika Utara, dan Indonesia.

yang dimaksud dengan konsep populisme. Saiful Mujani, “Populisme; Madu atau Racun bagi Demokrasi?”

Kristalisasi gerakan berada di dalam masa kekuasaan otoriter/represif seperti dalam kasus gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir ataupun penumpasan DI/TII dan pembubaran Masyumi pada windu terakhir kekuasaan Sukarno.

Bekas mendalam yang sama di satu sisi juga ditinggalkan oleh desakan-desakan modernisasi, namun di sisi lain juga oleh pendalaman konflik Perang Dingin di negeri-negeri Dunia Ketiga menyebabkan pertarungan keras antara kelompok-kelompok politik Islam/Muslim dengan kelompok-kelompok Nasionalis/Kiri. Runtuhnya gerakan Kiri juga membuat negara-negara tersebut kembali melakukan represi terhadap politik Islam. Dengan tekanan-tekanan modernisasi yang memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi dan represi negara, terjadi penguatan makna *ummat* menjadi dekat dengan menjadi bagian dari massa tertindas. Menurut Hadiz, inilah yang menjadi landasan struktural populisme Islam.

Bagian yang kemudian disorot adalah terkait dengan periode kebuntuan perjuangan Negara Islam, di mana kekuatan-kekuatan arus utama Islam (di Indonesia diidentifikasi sebagai jaringan NU dan Muhammadiyah) memilih untuk tidak terlibat di hadapan kekuatan koersif Negara. Kondisi tersebut mempersulit gerakan-gerakan politik Islam dan membuat mereka terpinggirkan dan menghadapi kebuntuan. Beberapa kelompok memilih jalan bawah tanah dan perjuangan bersenjata/kekerasan, sementara banyak lainnya berfokus pada aktivitas dakwah. Perbedaan-perbedaan yang terjadi kemudian mendorong fragmentasi gerakan menjadi organisasi-organisasi atau jaringan-jaringan yang lebih kecil dan lokal.

Menariknya, Hadiz kemudian mengajukan studi kasus tentang perkembangan gerakan Darul Islam (DI) setelah kekalahannya di 1960-an. Ia berpendapat bahwa DI memiliki pengaruh dan inspirasi yang sangat besar hingga sekarang. DI sendiri tidak ada bandingannya dalam komparasi dengan dua negeri lainnya dalam hal regenerasi dan diversifikasi jaringan turunannya (banyak di antaranya terlibat dalam konflik di Poso, Ambon, bahkan jejaring radikal/ekstrimis). Pada bagian ini, terlihat kaitan penting antara keturunan/keluarga anggota DI dengan jaringan/organisasi yang terinspirasi oleh DI. Namun sebagai catatan, problem inkohereni dalam pewarisan ideologi membuat para “pewaris” cita-cita DI tidak mendapatkan posisi politik yang kuat.

Masih dalam konteks Islam Indonesia, ketika Reformasi dan kebebasan politik mencuat sejak 1998, hal ini menjadikan suatu tantangan baru bagi gerakan politik Islam, Namun karena sistem politik elektoral yang tersedia juga membuat mereka harus bersaing dengan sesama mereka sendiri maupun dengan partai-partai yang terkait dengan ormas-ormas Muslim arus utama seperti NU dan Muhammadiyah, maka kekuatan pro-negara Islam Indonesia terpecah-pecah. Upaya representasi *ummat* ini pun pada akhirnya memperoleh 18% suara pada Pileg 2004, +/- 25% pada Pileg 2009 dan 31.5% pada 2014. Jika difokuskan pada partai-partai yang secara terbuka memproyeksikan *ummat* hanya mencapai 15% dari total suara 2014.³ Tercatat juga bagaimana langkah elektoral memiliki pengaruh dan kemenangan dalam politik, seperti perda-perda berbasis *syariah*. Akan tetapi, kompetisi elektoral, baik dengan partai-partai nasionalis maupun

dengan partai-partai terkait arus utama Muslim, menyebabkan mereka memoderasi isu-isu ataupun propaganda/kampanye non elektoral mereka.

Bersamaan dengan berjalannya demokrasi elektoral, pengaruh diskursus-diskursus ekonomi dan pemerintahan yang beraliran Neoliberal juga meluas. Akses yang baru diperoleh dari politik elektoral/kepartaian juga telah menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru, meskipun tidak sebesar para pebisnis besar. Pada abad 20, gerakan politik Islam dekat dengan proteksionisme sebagai alat pelindung kepentingan *ummat*. Meskipun tetap menyuarakan penolakan/perlawanan, berbagai pimpinan politik dan bisnis Islam juga memperlihatkan penerimaan dan mencari peran-peran baru di luar dari sebagai “korban” globalisasi. Hadiz, mengutip Mohamed Nour, juru bicara Partai Al Nour Mesir yang juga pengusaha teknologi perangkat lunak, tidak selamanya politik Islam bertentangan dengan kapitalisme.

Pandangan ini menyatakan bahwa etika Islam dapat berperan dalam mengendalikan kerusakan kapitalisme, dalam bentuk bisnis yang bernuansa nilai-nilai Islam. Di Indonesia, salah satu pimpinan politik Islam yang diwawancarai Hadiz malah menyatakan dukungannya untuk bergabung dalam sistem ekonomi kapitalis dunia melalui pengembangan bakat-bakat wirausaha dari *ummat*.

Satu catatan kesimpulan yang penting dari buku Hadiz ini menurut pengamatan Roy Abimanyu adalah tingkat adaptasi yang diambil oleh berbagai aliran dalam politik Islam untuk masuk ke dalam politik elektoral yang sekuler dan terlibat dalam neoliberalisme global. Di lain pihak, kondisi kerentanan akibat kebijakan-kebijakan neoliberal, yang notabene di mana partai-partai politik Islam terlibat di dalamnya, juga berkontribusi di dalam tendensi populis di masyarakat. Kerentanan ini pada akhirnya akan menjadi ruang beroperasinya lembaga-lembaga amal dan kemanusiaan yang baik langsung maupun tidak langsung terafiliasi dengan gerakan politik Islam.

Menurut Hadiz, kekuatan yang mengusung narasi populisme Islam tidak harus anti-neoliberalisasi seperti juga kendaraan politik Islam di masa lalu—contohnya, Ikhwanul Muslimin di Mesir—sebenarnya tidak pernah menentang kapitalisme. Kapitalisme yang tidak bermoral yang ditentang gerakan populis. Kapitalisme tidak bermoral ini bukan saja menjual minuman keras, seks atau mendorong praktik riba, tetapi juga menyebabkan tertinggalnya umat Islam secara sosial ekonomi—hal yang dikaitkan dengan kolonialisme Barat.

Keinginan yang sebenarnya dari umat Islam adalah kapitalisme yang lebih adil dalam arti membuka akses lebih besar kepada *ummah*. Jadi, di masa sekarang, neoliberalisasi mendapat dukungan apabila dapat menaikkan kondisi sosial ekonomi dan politik mereka yang dianggap bagian dari *ummah*. Hal ini terlihat di Turki, misalnya, bagaimana Partai Keadilan dan Pembangunan menjalankan kebijaksanaan ekonomi neoliberal dan mengangkat nasib perusahaan-perusahaan orang-orang provinsial—yang cenderung lebih religius. Mereka pada masa lalu terpinggirkan oleh elite ekonomi berbasis Istanbul yang cenderung lebih sekuler secara kultural.

Kehadiran populisme Islam dipicu oleh beberapa kenyataan yang ada. Menurut Vedi R. Hadiz dalam bukunya *Populisme Islam*, setidaknya ada tiga hal pemicunya. *Pertama* adalah adanya ketimpangan sosial yang secara historis

sangat tinggi. *Kedua* adalah bahwa hal itu disertai oleh peningkatan jumlah penduduk muda yang terdidik dan punya aspirasi tinggi sehingga antara realitas dengan aspirasi itu sangat berjarak. *Ketiga* tidak ada organisasi yang mampu menyalurkan aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok ini sehingga dalam waktu tegang, sewaktu-waktu bisa dirakit untuk keperluan politik sesaat.

Akumulasi kekecewaan dan persoalan sosial ekonomi tidak bisa diatasi secara mudah. Nah, hubungannya di mana? Narasi keumatan yang menjadi bagian sentral dari politik identitas itu mengandung narasi bahwa *ummah* itu adalah bagian dari kelompok sosial yang sudah sejak dulu terpinggirkan secara sistematis di Indonesia sejak kekalahan Masyumi di tahun 1950-an, pemberengusan DI/TII dan kemunduran politik umat Islam Indonesia di masa Orde Baru. Kekecewaan itu terakumulasi sejak dari zaman kolonial, pascakolonial masa Orde Baru hingga reformasi saat ini.

Jadi, itu memberikan potensi massa yang sangat besar untuk elite-elite yang saling berkompetisi saat ini. Massa orang yang marah, kecewa dan mungkin juga tingkat kepercayaan terhadap lembaga tidak terlalu tinggi. Massa ini kemudian menemukan suatu momentum seperti kasus yang terjadi pada Ahok yang dianggap sebagai menghina al-Qur'an.

Di sinilah bertemu antara perkembangan politik di arus bawah dan kepentingan elite politik di arus atas. Fraksi-fraksi oligarki yang berkompetisi mampu memobilisasi sentimen keagamaan (Islam) untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari massa Islam. Hal ini berhubungan dengan akumulasi kekecewaan sosial ekonomi yang lebih luas untuk memajukan kompetisi kepentingan politik Islam yang lebih besar.

POPULISME ISLAM SEBAGAI KRITIK

Populisme adalah gejala politik modern. Di beberapa negara terdapat gerakan yang bisa disebut atau dikelompokkan ke dalam gerakan populisme. Dalam sebuah negara yang mayoritas Kristen, orang akan menghubungkan keberadaan populisme dengan Kristen sehingga menjadi populisme Kristen. Demikian pula di negara yang mayoritas Islam gerakan ini akan dikaitkan atau dihubungkan dengan populisme Islam, seperti di Indonesia, Mesir dan Turki.

Apa sesungguhnya yang menggerakkan kelahiran populisme, para sarjana masih berdebat dan berbeda pendapat. Menurut Roy, populisme merupakan respon atas krisis sosial-ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Sebagai respon atas adanya krisis, maka populisme sebenarnya adalah kritik terhadap *status quo* atau kritik atas kekuasaan yang dianggap menyimpang. Sebagai sebuah kritik, ia merupakan gejala yang sehat bagi sebuah negara demokratis. Di sini populisme dapat dianggap sebagai gerakan yang wajar bahkan harus ada dalam sebuah negara demokratis karena salah satu ciri demokratisasi adalah adanya *counter-critik* atau *counter-ideology* serta adanya kontrol dari masyarakat atau rakyat.

Sistem demokrasi di negara berkembang meniscayakan kontrol dan kritik dari masyarakat sipil (*civil society*). Adalah hal biasa jika ada masyarakat sipil atau masyarakat warga berusaha mengekspresikan ketidakpuasannya atas suatu tata kelola negara atau tata kelola pemerintahan. Bahkan sudah menjadi pemandangan umum jika demokrasi selalu dihiasi oleh aksi-aksi politik atau

demonstrasi massa sebagai bentuk pernyataan kritik dan ketidakpuasan rakyat atas penguasa.

Kontrol dan kritik itu bisa jadi diekspresikan dalam bentuk kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga (negara) yang dianggap busuk atau korup. Ketika kelembagaan negara ditolak, ini berarti juga termasuk tokoh-tokoh dan mekanisme politik di dalamnya ikut ditolak. Ini yang menyebabkan pembesaran gerakan populisme akan diiringi oleh kemunculan seorang pemimpin yang kharismatik. Dalam kasus Aksi Bela Islam di Monas, sosok Habib Rizik Shihab dijadikan tokoh sentral dan menjadi sosok tokoh yang kharismatik, dan bukan lagi sebagai ketua umum Front Pembela Islam (FPI), melainkan tokoh yang merepresentasikan kekecewaan umat Islam Indonesia atas penguasa.

Selain itu, kehadiran gerakan populisme merupakan momen gerakan yang disokong oleh adanya industri media (baik media cetak maupun media sosial). Keberadaan media sosial menjadi ajang kampanye anti-kekuasaan yang mapan, dan seringkali menjadi wadah bagi mobilisasi massa oleh gerakan populisme Islam. Keberadaan media sosial begitu cepat dan ampuh dalam menggerakkan umat Islam yang kecewa dan merasa tidak puas atas kebijakan politik penguasa. Oleh karena itu, dibandingkan ideologi dan program politik, kekuatan dan *raison d'être* dari populisme adalah seruan (mobilisasi) kepada rakyat. Seruan mobilisasi ini seringkali tak terduga efek dan dampaknya sehingga dalam waktu yang singkat bisa menjadi suatu kekuatan massa aksi yang besar dan massif.

Namun demikian, sejauh ekspresi yang disampaikan dan cara-cara penyaluran kritik dan ‘kemarahan’ masih dapat ditolerir dan tidak melanggar hukum dan menimbulkan kekerasan, keberadaan gerakan populisme Islam tetap menjadi suatu kritik yang sehat bagi penguasa di sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Penyampaian kekecewaan dan kritik tetap dapat dibenarkan dan merupakan bagian inheren dalam sistem demokrasi baik di Barat maupun di Timur. Di sini populisme Islam tidak melulu sebagai ancaman bagi demokrasi, tetapi dapat menjadi sarana masukan dan pengimbang bagi kekuasaan. Meminjam istilah yang digunakan Saiful Mujani, populisme (Islam) bukan racun bagi demokrasi, tetapi bisa juga sebagai madu bagi demokrasi, tergantung bagaimana kita menyikapi keberadaan populisme Islam dan demokrasi tersebut.

PENUTUP

Populisme Islam merupakan gejala modern dari suatu kebangkitan Islam. Ia hadir bersamaan dengan momentum kebangkitan politik umat Islam. Kemunculannya seringkali dicurigai sebagai gerakan politik makar atau subversif karena ia melibatkan massa yang besar. Gerakan populisme Islam di Indonesia misalnya, yang secara mencolok tampil lewat aksi-aksi Bela Islam di Monas merupakan suatu gerakan kritik dan counter terhadap politik yang tidak bermoral dari penguasa. Sebagai sebuah kritik, kehadirannya sebetulnya merupakan gejala yang lumrah dan sehat bagi sistem negara demokratis karena ia dapat memberi masukan bagi penguasa. Menganggap populisme Islam di Indonesia sebagai melulu ancaman dan gerakan makar adalah terlampau berlebihan dan menunjukkan gejala anti-kritik.

Menyikapi keberadaan populisme Islam Indonesia seharusnya dilakukan melalui pendidikan politik dan proses penyadaran akan makna sesungguhnya berdemokrasi dan bernegara. Menganggap sistem demokrasi melulu berada di langit suci adalah sebuah gejala kemapanan dan anti-kritik. Dan ini merupakan pertanda yang kurang sehat dan kurang demokratis. Seharusnya, gerakan politik apa pun yang memberikan suara kritis dan masukan bagi kekuasaan harus disikapi secara dewasa dan wajar, bukan reaksioner dan menuding gerakan kritik tersebut sebagai makar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azyumardi Azra, "Populisme Islam" dalam rubrik Resonansi harian *Republika* 28 Desember 2017

Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*, LP3ES, Jakarta, 2019

B. Website

<https://geopolitik.org/2017/02/09/ulasan-buku-islamic-populism-in-indonesia-and-the-middle-east/>. dibuka pada 27 April 2019 pukul 20. 00 WIB

C. Surat Kabar

Saiful Mujani, "Populisme; Madu atau Racun bagi Demokrasi?" dalam *Majalah Tempo* edisi 29 Juli 2015